

Dinamika Sinisasi Agama:

Penerapan dan Dampak Kebijakan Sinisasi Agama Terhadap Kelompok Muslim di Xinjiang

Nadya Salsabillah Hazya

UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis Korespondensi: nsalsabillah12@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kebijakan Sinisasi agama yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok terhadap kelompok Muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme, alasan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap identitas dan praktik keagamaan komunitas Muslim di China. Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan historis dan politik. Dengan perolehan sumber melalui arsip laporan, artikel, buku dan karya ilmiah lainnya. Sinisasi adalah proses akulturasi atau asimilasi masyarakat non-China ke dalam budaya China, terutama budaya dan identitas Han China. Kebijakan ini diberlakukan secara turun temurun sejak kepemimpinan Presiden pertama. Dengan tujuan mengendalikan praktik keagamaan, tetapi juga untuk membangun hegemoni ideologis nasionalisme China. Kebijakan ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam praktik keagamaan, dimana banyak komunitas muslim dihadapkan pada tekanan untuk mengadaptasi ajaran mereka agar sejalan dengan nilai-nilai budaya Han. Selain itu, kelompok Muslim mulai kehilangan hak dan identitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang dinamika hubungan antara negara dan agama di era modern, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap pluralisme dan toleransi beragama di China.

Kata Kunci: *Sinisasi agama, Muslim China, Xinjiang.*

PENDAHULUAN

China sebagai negara dengan perkembangan populasi Muslim yang signifikan telah menjadi sorotan dunia karena penerapan kebijakan sinisasi agama yang intensif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan agama ke dalam ideologi negara dan mengontrol praktik keagamaan. Konsep sinisasi agama merupakan upaya pemerintah China untuk memastikan bahwa semua agama di negara tersebut harus sesuai dengan ideologi Partai Komunis China. Kebijakan ini telah diterapkan secara ketat terhadap berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Budha dan agama-agama lainnya, dengan tujuan untuk mengontrol dan membatasi pengaruh agama asing.

Sejak tahun 2014, pemerintah China telah meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap praktik keagamaan, terutama di wilayah Xinjiang. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah akan potensi radikalisme dan separatisme di kalangan kelompok minoritas Muslim. Upaya untuk mensinisasi agama ini mencakup pembatasan terhadap praktik ibadah pengawasan ketat terhadap masjid dan program pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pemahaman keagamaan masyarakat.

Xinjiang merupakan salah satu daerah yang penting bagi China karena memiliki wilayah yang strategis. Provinsi ini terletak di Jalur Sutra modern dan berbatasan dengan beberapa negara Asia Tengah. Wilayah ini juga termasuk dalam inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) China, yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional. Selain itu, Xinjiang memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam, yang merupakan wilayah ekonomi penting bagi pemerintah pusat. Namun, wilayah ini juga menjadi saksi adanya konflik perlawanan etnis Uighur terhadap peraturan yang semakin ketat dari pemerintah pusat.

Sejak awal tahun 2023, kebijakan sinisasi agama di Xinjiang semakin diperketat seiring dengan meningkatnya ketegangan etnis dan tindakan separatis oleh kelompok Uyghur, yang sering dikaitkan dengan ancaman terorisme oleh pemerintah China. Dalam konteks ini, kebijakan sinisasi agama merupakan bagian dari strategi hegemoni pemerintah untuk menciptakan konsensus di kalangan masyarakat. Pemerintah berusaha membentuk pandangan dunia yang sama melalui pengendalian budaya, agama dan pendidikan, sehingga nilai-nilai komunis yang ditanamkan dapat diterima oleh masyarakat tanpa adanya pertanyaan. Proses ini merupakan contoh dari bentuk hegemoni, di mana negara tidak memerlukan kekerasan fisik untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga melalui pengendalian ideologis dan budaya dari kehidupan penduduknya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan sinisasi terhadap kelompok Muslim merupakan langkah-langkah represif, seperti larangan beribadah di masjid, praktik keagamaan dan lainnya, yang digunakan untuk mengubah pemikiran kelompok minoritas agar lebih selaras dengan nilai negara (Fathil, 2019). Literatur yang ditulis oleh Trisni Salsa menyebut bahwa kebijakan sinisasi merupakan bagian dari kampanye “*Chinese Dream*” yang sedang dijalankan oleh Xi Jinping untuk menuju perekonomian yang lebih maju dari saat ini (Ramadina, 2022). Literatur lain mengatakan, terdapat perlakuan berbeda yang dirasakan oleh muslim Hui dan Uyghur. Perbedaan perlakuan ini dikarenakan pemerintah lebih menyukai orang Hui yang merupakan orang Han Islam (Zhang, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme, alasan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap identitas dan praktik keagamaan komunitas Muslim di China. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni milik Gramsci, yang menekankan bagaimana negara memanfaatkan ideologis dan kekuasaan untuk mengontrol kelompok minoritas. Dalam kasus Xinjiang, kebijakan sinisasi agama dapat dipahami sebagai upaya negara untuk membangun dominasi budaya dan ideologi di kalangan minoritas Uyghur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Sinisasi Agama

Sinisasi merupakan proses dimana budaya, adat istiadat atau kebijakan negara China diadopsi atau dipaksakan pada kelompok etnis atau wilayah non-China. Istilah ini berasal dari kata “*Sino*” yang merujuk pada China. (“*Sinicization*,” 2024) Sinisasi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, tradisi, agama dan nilai-nilai sosial. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi,

sosial dan budaya. Sinisasi seringkali dikaitkan dengan perluasan pengaruh budaya China dan integrasi budaya-budaya lain ke dalam kerangka budaya China.

Sinisasi telah terjadi sejak zaman Dinasti Han (206 SM-220 M), ketika China mulai melakukan kontak budaya asing melalui Jalur Sutra. Pada periode ini, pengaruh budaya asing seperti agama Buddha dari India mulai masuk ke China. Meskipun pada awalnya terdapat penolakan, agama Buddha pada akhirnya mulai diterima dan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal, yang menghasilkan bentuk-bentuk baru praktik keagamaan yang dikenal sebagai Buddhisme Tiongkok (Rahmat Fajar, 2013).

Pada masa Dinasti Tang (618-907 M), sinisasi berkembang dengan pesat. Periode ini dikenal dengan masa toleransi religius yang tinggi. Agama-agama seperti Buddhisme, Nestorianisme (aliran Kristen), Islam dan Manichaeisme diterima dan berkembang cukup baik di China. Agama tersebut menyesuaikan dengan budaya dan kepercayaan tradisional China, sehingga muncul aliran baru dari perpaduan antara ajaran asli agama dan unsur-unsur China. Banyak kaisar pada masa ini menganut agama Buddha dan memberikan dukungan penuh atas perkembangan agama. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan kuil dan vihara yang besar di seluruh penjuru China (Fathil, 2019). Pada masa kerajaan, kebijakan pemerintah terhadap kelompok Muslim saat itu bersifat toleran dan fleksibel. Meskipun terdapat beberapa peristiwa yang menjadikan Muslim tertindas akibat hal yang bersifat politis daripada agama

Masa Dinasti Ming (1368-1644 M), berfokus untuk mengembalikan identitas asli China yang berpusat pada budaya Han.. Kebijakan sinisasi pada masa ini lebih menonjol karena kebangkitan nasionalisme budaya Han, yang mendorong integrasi nilai-nilai China ke dalam praktik agama asing (Ibrahim, 2016). Islam yang telah masuk ke China pada masa Dinasti Tang, memperoleh pengakuan sebagai agama minoritas dan kelompok komunal di China. Pada masa ini, Muslim lebih disukai oleh penguasa Ming, sehingga era ini disebut sebagai “Zaman Keemasan Islam” di China. Kaisar Xuande memerintahkan untuk mendirikan masjid di Nanjing, kemudian memperbolehkan kaligrafi Islam ditulis di permukaan masjid (Fathil, 2019). Beberapa orang muslim menduduki posisi penting sebagai pemimpin militer dan jenderal. Kontribusi mereka juga dicatat dalam bidang sains dan pengetahuan. Meskipun pemerintah China saat itu terlihat pro-Islam, namun kelompok Muslim juga harus tunduk terhadap kebijakan integrasi Ming, yang pada akhirnya membuat mereka lebih condong ke budaya China. Salah satu kebijakannya adalah harus menikah dengan orang Han China.

Memasuki era modern, China sempat menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal. Ekonomi negara mengalami kemunduran, ketertinggalan teknologi dan bentuk pemerintahan yang masih monarki absolut. Hingga muncul Gerakan Kebangkitan Tiongkok dan Reformasi pada tahun 1898. Gerakan ini bertujuan untuk mereformasi sistem politik, pendidikan dan budaya China. Para intelektual berusaha menggabungkan elemen-elemen modern dengan tradisi China, sehingga menciptakan bentuk baru dari nasionalisme yang berakar pada budaya lokal.

Setelah Revolusi Komunis tahun 1949 dan berdirinya Republik Rakyat China (RRC), Partai Komunis China (PKC) menganggap agama sebagai ancaman terhadap

kekuasaan mereka. Sinisasi menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong dari PKC, kebijakan ini diberlakukan dengan upaya penguatan ideologi komunis dan penolakan terhadap pengaruh asing, termasuk agama. Kebijakan ini dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan, yang berlangsung pada tahun 1966-1976 (CFR, 2024). Dalam hal ini, Mao menfokuskan pada 4 *olds*, yaitu kebudayaan, kebiasaan lama, tradisi dan gagasan pemikiran.

Dampak dari peristiwa ini, seperti banyak tempat ibadah yang ditutup, bahkan dalam penerapannya seringkali melibatkan penindasan terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak cocok atau bertentangan dengan ideologi komunis. Mao berupaya membentuk identitas nasional yang kuat melalui kebijakan asimilasi, dengan keyakinan bahwa persatuan nasional bisa dicapai jika semua kelompok etnis minoritas mengadopsi budaya Han dan meninggalkan tradisi mereka. Hal ini tercermin dalam upaya mempromosikan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama di seluruh Tiongkok, serta dalam sistem pendidikan yang menekankan nilai-nilai sosialisme dan budaya Han.

Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi salah satu warisan kebijakan yang masih diberlakukan hingga saat ini. Meskipun, telah mengalami banyak perubahan di bawah kepemimpinan selanjutnya, sinisasi tetap hadir dalam kebijakan pemerintah China saat ini. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping -Presiden China saat ini- muncul kebijakan baru berupa “Sinisasi Agama”. Kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Mao, yaitu melibatkan penyesuaian ajaran agama dengan nilai-nilai sosialis serta pengawasan ketat terhadap praktik keagamaan.

Kebijakan Sinisasi Agama

Sinisasi agama adalah kebijakan yang dikenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengintegrasikan agama-agama di China dengan ideologis sosialis dan nasionalisme. Xi Jinping merupakan Presiden RRC yang terpilih pada 14 Maret 2013 melalui pemungutan suara oleh Kongres Rakyat Nasional (*National People's Congress*) yang merupakan lembaga legislatif tertinggi di China. Sebelum menjadi Presiden, Xi menjadi pejabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan Ketua Komisi Militer Pusat, yang memberinya pengaruh besar dalam struktur pemerintahan China. Pada 10 Maret 2023, Xi terpilih kembali menjadi Presiden yang menjadi masa jabatan ketiganya. Sebelumnya, masa jabatan Presiden RRC hanya 5 tahun. Namun, pada tahun 2018 kebijakan ini dihapuskan oleh Xi dan menjadikannya Presiden pertama yang menjabat lebih dari dua periode. (BBC, n.d.)

Pada “Pertemuan Kerja Nasional 2015 Tentang Agama” yang diselenggarakan oleh Departemen Front Bersatu belum menyertakan penyebutan “sinisasi agama”. Pada April 2016, di Konferensi Keagamaan Tahunan yang diketuai oleh Xi Jinping membahas tentang pentingnya “membangun teori agama sosialis yang bercirikan China”. (习近平, n.d.) Xi menyampaikan perlunya membangun hubungan keagamaan yang positif dan sehat, serta menegaskan bahwa kelompok agama adalah jembatan dan penghubung bagi partai dan pemerintah agar terhubung dengan tokoh-tokoh agama. Kebijakan tersebut disampaikan dengan serius dan menonjol dalam laporan pada awal Kongres ke-19 PKT,

pada bulan Oktober 2017. Laporan resmi tersebut terdapat pada poin “*Consolidating and developing the patriotic united front*” yang berbunyi sebagai berikut:

“We will fully implement the Party’s basic policy on religious affairs, uphold the principle that religions in China must be Chinese in orientation and provide active guidance to religions so that they can adapt themselves to socialist society. We will encourage intellectuals who are not Party members and people belonging to new social groups to play the important roles they have in building socialism with Chinese characteristics. We should form a new type of cordial and clean relationship between government and business, promote healthy growth of the non-public sector of the economy, and encourage those working in this sector to achieve success. We will maintain extensive contacts with overseas Chinese nationals, returned Chinese and their relatives and unite them so that they can join our endeavors to revitalize the Chinese nation.”(Jinping, n.d.)

Pernyataan diatas menjelaskan jika tujuan sinisasi agama merupakan bentuk bahwa China telah memasuki “*New Era*” (Vermader, 2019). Jika dilihat melalui sejarah negara dalam pembangunan negara, dapat dilihat bahwa motif dari kebijakan ini adalah upaya untuk menciptakan stabilitas dalam negeri yang sepanjang sejarah berfokus pada pembangunan intensif. Kebijakan ini diberlakukan kepada seluruh agama di China, termasuk Islam, Buddha dan Kristen.

Dampak Sinisasi Agama Terhadap Kelompok Muslim di Xinjiang

Setelah diresmikanya kebijakan sinisasi agama oleh Xi Jinping, Xinjiang yang merupakan daerah dengan penduduk Muslim terbesar di China mengalami dampak yang signifikan. Perlu diketahui bahwa daerah ini sempat mengalami perkembangan demografi karena meningkatnya jumlah migrasi. Reformasi ekonomi dapat dikatakan menjadi penyebab terjadinya perubahan ini (Ramadina, 2022). Pemerintah China berupaya menggabungkan Xinjiang ke dalam negara secara menyeluruh melalui migrasi besar suku Han ke wilayah ini. Namun, hal ini menimbulkan konflik antar kelompok etnis lokal, seperti Uyghur yang merasa identitas mereka terancam hilang akibat kebijakan asimilasi. Selain itu, terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok Uyghur dan Han. Etnis Han umumnya mendominasi sektor ekonomi dan pekerjaan formal, sedangkan Uyghur lebih banyak bekerja di sektor informal dan mengalami pengangguran tinggi. (Wu & Song, 2014)

Selain ketidak merataan pekerjaan, kegiatan agama apapun disana harus berada dibawah pengawasan PKC. Sejak terjadi peristiwa pengeboman pada tahun 2014, pemerintah China lebih mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Muslim. Presiden Xi mengeluarkan sebuah “Kampanye Serang Keras Melawan Terorisme” pada tahun 2014. Dalam kampanye ini, masyarakat etnis Uyghur dan kelompok minoritas lainnya dipaksa untuk masuk ke kamp-kamp pengasingan. Pemerintah China mengatakan jika kamp tersebut merupakan pusat pelatihan yang bertujuan untuk memerangi ekstremisme. Namun, mereka yang telah mengikuti kamp tersebut mengatakan bahwa mereka diasimilasi secara paksa ke dalam masyarakat Han.

(Khatchadourian, 2021). Kebijakan ini termasuk salah satu bentuk penindasan yang sistematis. Di dalam kamp, mereka diharuskan mempelajari bahasa Mandari dan propaganda PKC, serta dilarang berbicara dalam bahasa Uyghur dan menjalankan ibadah.

Dampak lain juga dirasakan oleh kelompok Muslim di Xinjiang, yaitu pentupan, menghancurkan, menonaktifkan dan mengubah arsitektur masjid. Sebagai contoh pengubahan arsitektur adalah dihapusnya menara serta kubah pada masjid dan diubah agar terlihat lebih “China”. (Tiongkok, 2023) Jika, seseorang yang tidak mengerti bahwa itu masjid, mereka akan mengira bahwa itu adalah sebuah kuil/kelenteng.

Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam membatasi praktik keagamaan. Bahkan mereka sampai memasang CCTV untuk mengawasi gerak-gerik umat Muslim. Pada dasarnya, sejak tahun 1966 selama Revolusi Kebudayaan, pemerintah China tidak akur dengan kelompok orang yang beragama. Pemerintah China juga menerapkan kebijakan, di mana anak-anak dibawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan ke masjid dan mengikuti pendidikan agama. Hal ini bertujuan untuk memutus hubungan generasi muda dengan agama mereka dengan cara mencegah praktik keagamaan di usia dini.

Dampak-dampak diatas telah masuk kedalam tindakan genosida yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun pemerintah China berkali-kali telah diperingatkan oleh *Human Right Watch* dan lembaga hak asasi manusia lainnya tetap saja tidak terdapat perkembangan. Mereka tetap menjalankan kebijakan ini, bahkan merevisi undang-undang mereka. Pemerintah China merevisi UU dengan pasal memperketat control keagamaan yang akan diberlakukan mulai 1 September 2023. Peraturan ini mengharuskan disetiap pengurus tempat ibadah terdapat anggota PKC (马娟, 2023).

Jika dilihat, kebijakan sinisasi agama bertujuan menghapus pengaruh “luar” atau “asing” dalam agama-agama tertentu, seperti pengaruh budaya Arab dalam Islam. Dalam hal ini, hegemoni tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan publik, tetapi juga berkaitan dengan mempengaruhi pemikiran komunitas. Seperti penduduk Uyghur yang secara bertahap akan menerima dominasi ideologi negara dan beranggapan bahwa ini merupakan hal yang wajar.

PKC dalam penerapan sinisasi agama menggunakan narasi sebagai upaya mencegah terjadinya ekstremisme. Upaya tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Han. Ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mempertahankan dominasi ideologi dengan menciptakan narasi bahwasanya sinisasi agama diperlukan demi menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

KESIMPULAN

Kebijakan sinisasi telah ada sejak masa kerajaan dengan penerapan yang berbeda-beda. Pada masa Dinasti Tang, toleransi agama sangat tinggi, agama-agama yang telah ada diterima dan berkembang cukup baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya tempat-tempat ibadah. Pada masa Dinasti Ming dikenal sebagai Masa Kejayaan Islam di China. Di mana saat itu pemerintah China senang dengan adanya Islam. Mereka memperbolehkan menuliskan kaligrafi di dinding-dinding masjid. Kebijakan sinisasi agama terjadi pada era Xi Jinping. Kebijakan ini diresmikan pada tahun 2016 dan masih

berlaku hingga sekarang. Dalam penerapannya, pemerintah China telah banyak melakukan pelanggaran HAM. Dimana kelompok muslim di Xinjiang mengalami ketidakbebasan dalam beragama. Hal ini ditandai dengan perubahan arsitektur masjid dengan menghilangkan unsur luar, pengawasan ditempat ibadah dan lain-lain. Meskipun telah mendapat kecaman dari komunitas luar negeri, pemerintah China tetap menjalankan kebijakan ini dan tidak mempermasalahkannya. Dapat dilihat bahwa pemerintah China berupaya mendominasi negara untuk mempertahankan ideologi mereka melalui hegemoni budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43361276>
- CFR. (2024). *The State of Religion in China*.
<https://www.cfr.org/background/religion-china>
- Fathil, F. (2019). Islam in Imperial China: Sinicization of Minority Muslims and Synthesis of Chinese Philosophy and Islamic Tradition. *Kemanusiaan the Asian Journal of Humanities*, 26(Supplement 1), 167–187.
<https://doi.org/10.21315/kajh2019.26.s1.9>
- Ibrahim, N. (2016). ISLAM DI CINA (MASA DINASTI MING 1368-1644 M). *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i1.2574>
- Jinping, X. (n.d.). *Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous*.
- Khatchadourian, R. (2021, April 5). Surviving the Crackdown in Xinjiang. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2021/04/12/surviving-the-crackdown-in-xinjiang>
- Rahmat Fajar, N. 08520029. (2013). *INTERAKSI AGAMA-AGAMA DI SEPANJANG JALUR SUTERA PADA MASA DINASTI HAN (206 SM-220 M)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA]. <https://doi.org/10/preview.jpg>
- Ramadina. (2022). *Kebijakan Sinicization Pemerintah Cina Era Presiden Xi Jinping: Motif & Dampaknya Terhadap Masyarakat Etnis Uyghur di Xinjiang*. Universitas Gajah Mada.
- Sinicization. (2024). In *Wikipedia*.
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinicization&oldid=1250916190>
- Tiongkok: Masjid Ditutup, Diratakan, dan Diubah di Area Muslim | *Human Rights Watch*. (2023, November 22). <https://www.hrw.org/id/news/2023/11/22/china-mosques-shuttered-razed-altered-muslim-areas>

- Vermander, B. (2019). Sinicizing Religions, Sinicizing Religious Studies. *Religions*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.3390/rel10020137>
- Wu, X., & Song, X. (2014). Ethnic Stratification amid China's Economic Transition: Evidence from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. *Social Science Research*, 44, 158–172. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.12.002>
- Zhang, B. (2022). An Analysis of China's Muslim-Related Policies from the Perspectives of Ethnic Heterogeneity, Sinicization and “Anxiety Management.” *Islamophobia Studies Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.13169/islastudj.7.1.0045>
- 习近平. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/23/c_1118716540.htm
- 马娟. (2023). 国家宗教事务局令 (第19号) 宗教活动场所管理办法_2023年第24号国务院公报_中国政府网. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10666/202308/content_6900867.html